



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 1, No. 3, Tahun 2025

doi.org/10.63822/j1a14570

Hal. 481-492

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Agama dalam Perspektif Perdamaian

Faridah¹, Mat Rokim², Sutomo³

Pascasarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang^{1,2,3}

E-mail: faromuzi67381@gmail.com, matrokim.aa@gmail.com, sutomoputro99@gmail.com

Diterima: 25-07-2025 | Disetujui: 07-09-2025 | Diterbitkan: 09-08-2025

ABSTRACT

The role of religion in shaping and sustaining global peace has become a significant topic of discussion across various interdisciplinary studies, ranging from theology and sociology to international relations. Although often associated with conflict and violence throughout human history, religion inherently contains universal values that promote solidarity, social justice, reconciliation, and nonviolence. This article aims to critically explore the role of religion as an instrument of peace in the contemporary context marked by identity conflicts, social polarization, and structural violence. By examining sacred texts, ethical teachings from major religious traditions, and empirical studies on faith-based peace initiatives, this paper asserts that religion is not merely a cultural construct but a moral and spiritual force capable of strengthening social cohesion and fostering intergroup dialogue. Through a multidisciplinary approach, the author proposes a conceptual framework that positions religion as a normative actor in conflict resolution and the construction of inclusive and sustainable peace. This study concludes that peace rooted in religious values is more likely to take hold within societies because it resonates with the deepest dimensions of personal identity and moral motivation. Therefore, the role of religion in peace processes cannot be overlooked but must be constructively mobilized through education, interfaith dialogue, and cross-sector collaboration.

Keywords : Religion, Peace, Reconciliation, Interfaith Dialogue, Structural Violence, Identity, Social Justice..

ABSTRAK

Peran agama dalam membentuk dan memelihara perdamaian global telah menjadi topik diskusi yang signifikan dalam berbagai kajian lintas disiplin, mulai dari teologi, sosiologi, hingga hubungan internasional. Meski kerap kali dikaitkan dengan konflik dan kekerasan dalam sejarah kemanusiaan, agama sejatinya mengandung nilai-nilai universal yang mendorong solidaritas, keadilan sosial, rekonsiliasi, dan non-kekerasan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara kritis peran agama sebagai instrumen perdamaian dalam konteks kontemporer yang sarat konflik identitas, polarisasi sosial, dan kekerasan struktural. Dengan menelaah teks-teks suci, ajaran etis dari berbagai tradisi agama besar, serta studi-studi empiris tentang inisiatif perdamaian berbasis agama, tulisan ini menegaskan bahwa agama bukan semata-mata produk budaya, melainkan kekuatan moral dan spiritual yang dapat memperkuat kohesi sosial dan membangun ruang dialog lintas perbedaan. Melalui pendekatan multidisipliner, penulis mengajukan kerangka konseptual yang menempatkan agama sebagai aktor normatif dalam resolusi konflik dan pembangunan perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perdamaian yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan lebih berpotensi berakar dalam kehidupan masyarakat karena ia menyentuh dimensi terdalam dari identitas dan motivasi moral individu. Oleh karena itu, peran agama dalam proses perdamaian tidak dapat diabaikan, namun harus dimobilisasi secara konstruktif melalui pendidikan, dialog antariman, dan kolaborasi lintas sektoral.

Kata Kunci : Agama, Perdamaian, Rekonsiliasi, Dialog Antariman, Kekerasan Struktural, Identitas, Keadilan Sosial.



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Faridah, Mat Rokim, & Sutomo. (2025). Agama dalam Perspektif Perdamaian. Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 1(3). <https://doi.org/10.63822/j1a14570>



PENDAHULUAN

Perdamaian merupakan prasyarat fundamental bagi kelangsungan hidup umat manusia dan stabilitas peradaban dunia. Dalam era globalisasi yang diwarnai oleh intensifikasi interaksi lintas budaya, eskalasi konflik identitas, dan meningkatnya ketimpangan sosial, pencarian terhadap fondasi etis dan spiritual untuk membangun tatanan sosial yang adil dan harmonis menjadi suatu urgensi. Salah satu sumber historis dan normatif yang paling kuat dalam membentuk konstruksi sosial dan moral masyarakat adalah agama. Agama, dalam pengertian substantif, bukan sekadar sistem kepercayaan atau praktik ritus keagamaan, melainkan kerangka nilai yang menyentuh dimensi terdalam dari eksistensi manusia, memberikan makna terhadap penderitaan, keadilan, pengampunan, dan harapan. Dalam hampir semua peradaban besar dunia, agama hadir sebagai kekuatan pendorong dalam membentuk norma, institusi, dan perilaku sosial. Ia menyediakan panduan moral, menetapkan batasan etis, serta membentuk solidaritas komunitas yang berkelanjutan. Fungsi religius ini menjadikan agama sebagai aktor penting dalam membangun perdamaian yang berakar kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat. Namun demikian, sejarah manusia juga mencatat bahwa agama tidak jarang menjadi justifikasi bagi kekerasan, diskriminasi, dan eksklusivisme identitas, terutama ketika ia dipolitisasi, disalahtafsirkan, atau dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan.

Paradoks ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam studi agama dan perdamaian: apakah agama sejatinya merupakan sumber konflik atau sebaliknya, fondasi etis yang paling potensial dalam membangun perdamaian yang lestari? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan pendekatan yang tidak simplistik dan tidak reduksionistik, melainkan reflektif dan multidisipliner. Pendekatan seperti ini memungkinkan kita untuk membedakan antara ekspresi agama yang otentik—yang membawa nilai-nilai kasih, keadilan, dan rekonsiliasi—dengan penyimpangan agama yang bersifat destruktif akibat politisasi, ekstremisme, atau eksklusivisme teologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana agama, dalam berbagai tradisinya, menyediakan perangkat normatif dan praktis dalam merespons tantangan perdamaian di era kontemporer. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana agama dapat dimobilisasi secara konstruktif sebagai aktor transformasi sosial, agen rekonsiliasi, dan mediator dalam penyelesaian konflik, dengan dukungan pendekatan teologi perdamaian, dialog antariman, serta praktik-praktik spiritual yang membebaskan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam narasi dan konsep perdamaian dalam berbagai tradisi keagamaan serta menelaah kontribusi agama terhadap pembangunan perdamaian dalam konteks sosial-kultural dan politik kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis teks-teks normatif, pemikiran teologis, serta wacana-wacana keagamaan secara interpretatif dan kritis. Data dalam penelitian ini bersumber dari literatur primer dan sekunder. Sumber primer mencakup teks-teks suci agama-agama besar (seperti Al-Qur'an, Alkitab, Tripitaka, dan Weda), serta dokumen-dokumen keagamaan resmi dan pernyataan lembaga-lembaga keagamaan internasional terkait perdamaian.



Sumber sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal akademik, laporan penelitian, serta hasil konferensi internasional yang membahas peran agama dalam resolusi konflik dan pembangunan perdamaian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur, dengan fokus pada identifikasi tema-tema kunci seperti rekonsiliasi, keadilan, non-kekerasan, dialog antariman, dan transformasi konflik. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan hermeneutika kritis, yang memungkinkan peneliti untuk memahami makna teks dalam konteks historis, sosial, dan teologis. Dalam kerangka interpretasi kritis, pendekatan multidisipliner digunakan untuk memahami fenomena secara holistik. Studi ini mengintegrasikan perspektif teologi, filsafat agama, studi perdamaian (peace studies), dan sosiologi agama untuk membangun argumen yang komprehensif.

Validitas kajian dijaga melalui triangulasi sumber, analisis komparatif lintas tradisi keagamaan, serta keterlibatan dalam tinjauan literatur mutakhir dari berbagai konteks geografis dan kultural. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menggali secara mendalam bagaimana narasi-narasi keagamaan dapat berkontribusi secara nyata dalam membangun perdamaian yang inklusif, berkelanjutan, dan berakar pada nilai-nilai spiritual yang universal.

PEMBAHASAN

Agama Sebagai Sumber Nilai-Nilai Perdamaian Universal

Pada tataran normatif, hampir seluruh agama besar dunia memuat prinsip-prinsip dasar yang mendukung perdamaian dan keharmonisan sosial. Islam, misalnya, secara eksplisit menempatkan perdamaian (as-salām) sebagai salah satu asas moral tertinggi, sebagaimana tercermin dalam nama-nama Tuhan (Asma'ul Husna) dan dalam perintah untuk berlaku adil serta menjauhi permusuhan (QS. Al-Mumtahanah: 8). Dalam Kekristenan, pesan sentral Yesus tentang kasih terhadap sesama, bahkan terhadap musuh (Matius 5:44), menjadi dasar spiritual bagi gerakan perdamaian di berbagai belahan dunia. Demikian pula dalam Buddhisme, ajaran ahimsa (non-kekerasan) dan pencerahan batin menjadi pilar dalam membina hubungan tanpa kekerasan.

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa secara substansial, agama tidak hanya mampu memberikan motivasi spiritual, tetapi juga kerangka etis untuk mengatasi konflik dan membangun solidaritas lintas identitas. Dengan kata lain, agama tidak semata-mata berfungsi sebagai simbol identitas eksklusif, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang inklusif dan berorientasi pada kemanusiaan universal.

Paradoks Religius: Antara Potensi Konflik dan Daya Damai

Meskipun mengandung nilai-nilai damai, realitas historis menunjukkan bahwa agama kerap dijadikan justifikasi bagi kekerasan, baik dalam bentuk konflik antaragama, sektarianisme intra-agama, maupun ekstremisme ideologis. Fenomena ini tidak disebabkan oleh agama itu sendiri, melainkan oleh pemaknaan sempit dan politisasi agama oleh aktor-aktor yang berkepentingan. Dalam konteks ini, Appleby (2000) mengemukakan bahwa agama memiliki ambivalensi sakral (ambivalence of the sacred): ia dapat menjadi pemicu konflik ataupun sumber rekonsiliasi, tergantung pada siapa yang menafsirkannya dan bagaimana ia dimobilisasi secara sosial-politik.

Pengalaman konflik di berbagai wilayah—seperti perang identitas di Timur Tengah, kekerasan komunal di Asia Selatan, atau sektarianisme di Afrika Sub-Sahara—menunjukkan bahwa agama dapat



dengan mudah diselewengkan menjadi alat hegemoni dan eksklusivisme. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara agama sebagai sistem nilai (religion as faith) dan agama sebagai alat kekuasaan (religion as politics). Pembacaan kritis terhadap teks dan konteks keagamaan menjadi kunci untuk mengembalikan fungsi etis dan spiritual agama dalam ruang publik.

Peran Strategis Agama dalam Proses Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

Dalam berbagai konteks pascakonflik, agama terbukti berperan sebagai katalisator dalam proses rekonsiliasi. Gereja-gereja di Rwanda, lembaga-lembaga Islam di Aceh pasca-tsunami dan konflik GAM, serta Dewan Ulama dan pemimpin Hindu di India, menunjukkan bahwa ketika aktor keagamaan terlibat secara aktif dalam membangun jembatan komunikasi dan memfasilitasi pengampunan, maka proses perdamaian menjadi lebih holistik dan berakar dalam nilai-nilai lokal. Hal ini diperkuat oleh legitimasi moral yang dimiliki oleh tokoh agama di tengah masyarakat, yang sering kali melebihi otoritas formal dari negara atau organisasi internasional.

Agama juga memainkan peran penting dalam memberikan makna terhadap penderitaan dan trauma, melalui ritual spiritual, pendidikan damai berbasis nilai-nilai iman, serta penyembuhan kolektif melalui komunitas. Oleh karena itu, pembangunan perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat mengabaikan aspek spiritual dan kultural yang dibawa oleh tradisi agama.

Dialog Antariman sebagai Platform Perdamaian Global

Salah satu praktik strategis yang menunjukkan kapasitas agama dalam membina perdamaian adalah dialog antariman (interfaith dialogue). Dialog ini berfungsi sebagai sarana untuk mengatasi stereotip, membangun empati lintas keyakinan, dan menciptakan ruang bersama untuk kerja sama sosial. Ketika dilakukan secara jujur dan setara, dialog antariman mampu mencegah konflik, membangun jaringan lintas komunitas, serta memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat yang plural.

Namun demikian, dialog antariman tidak cukup jika hanya berhenti pada tingkat simbolik atau seremoni elit. Ia harus diterjemahkan ke dalam aksi nyata—seperti advokasi keadilan sosial, solidaritas kemanusiaan lintas iman, serta kebijakan publik yang mendukung inklusivitas. Keterlibatan generasi muda dan tokoh perempuan dalam ruang-ruang dialog juga menjadi elemen penting agar proses ini tidak hanya elitis, tetapi partisipatoris dan transformatif.

Revitalisasi Peran Agama di Era Krisis Global

Krisis multidimensional yang dihadapi dunia saat ini—termasuk krisis lingkungan, kemiskinan global, konflik identitas, dan disrupsi digital—membutuhkan pendekatan yang lebih spiritual dan reflektif. Agama dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ekologi spiritual (spiritual ecology), etika kepedulian sosial, serta semangat kolektif untuk membangun dunia yang lebih adil dan damai. Inisiatif lintas agama dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, pengungsi, dan hak asasi manusia menunjukkan bahwa agama tidak statis, melainkan adaptif terhadap tantangan zaman.

Oleh karena itu, revitalisasi peran agama harus diarahkan pada penguatan fungsi kritis dan profetik agama dalam menghadapi ketimpangan struktural dan kekerasan sistemik. Agama tidak boleh terjebak dalam dogmatisme eksklusif, tetapi harus menjadi kekuatan moral yang aktif dalam menegakkan martabat manusia dan mendorong peradaban damai yang berkelanjutan.



Agama dan Nilai-Nilai Perdamaian

Secara konseptual, agama berperan sebagai sistem nilai yang menanamkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam kehidupan manusia, dan salah satu pilar utama yang dijunjung dalam hampir semua tradisi keagamaan adalah perdamaian. Agama tidak hanya membimbing umatnya dalam hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga dalam relasi horizontal antarsesama manusia dan dengan alam semesta. Dalam konteks ini, nilai-nilai perdamaian—seperti kasih sayang, keadilan, toleransi, pengampunan, dan penghormatan terhadap martabat manusia—menjadi bagian integral dari ajaran agama yang bersifat universal dan transkultural.

Agama-agama Abrahamik—Islam, Kristen, dan Yahudi—menyediakan narasi-narasi teologis yang kuat tentang pentingnya hidup dalam kedamaian, baik secara individual maupun komunal. Islam, misalnya, tidak hanya menyematkan akar kata "salam" (damai) dalam identitasnya (*dīn al-salām*), tetapi juga mengajarkan prinsip *rahmatan lil-‘ālamīn*, yaitu menjadi rahmat bagi seluruh makhluk (QS. Al-Anbiyā': 107). Dalam etika sosial Islam, nilai-nilai keadilan (*‘adl*), persaudaraan (*ukhuwwah*), dan perdamaian aktif (*ṣulh*) ditegaskan sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Ajaran ini diperkuat dalam hadis-hadis yang menyerukan kepada umat untuk menghindari kekerasan, menegakkan keadilan, dan memaafkan pihak yang bersalah sebagai jalan menuju rekonsiliasi.

Kekristenan, terutama dalam narasi Injil, menekankan kasih tanpa syarat sebagai hukum moral tertinggi. Konsep *agape* atau kasih ilahi merupakan dasar dari relasi sosial yang inklusif, di mana pengikut Yesus Kristus diajak untuk mengasihi sesama tanpa memandang latar belakang sosial, etnis, atau keyakinan, bahkan mengasihi musuh mereka (Lukas 6:27–36). Nilai ini menjadi kekuatan moral di balik banyak gerakan non-kekerasan dan perdamaian, seperti yang dipraktikkan oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr. dan Desmond Tutu.

Dalam tradisi Yahudi, prinsip *shalom* (damai) bukan sekadar ketiadaan konflik, tetapi juga mencerminkan keutuhan, keadilan, dan keharmonisan dalam seluruh aspek kehidupan. Kitab-kitab suci Yahudi mendorong umat untuk menjadi pembawa damai (*rodef shalom*), serta menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai bentuk kesalehan religius.

Sementara itu, tradisi-tradisi agama Timur seperti Hindu, Buddha, dan Konfusianisme juga menempatkan perdamaian sebagai orientasi spiritual dan sosial. Dalam Hindu, konsep *ahimsa* (tidak menyakiti makhluk hidup) dan *dharma* (kebenaran dan tugas moral) menjadi basis etika untuk menjalin kehidupan damai, baik dengan manusia maupun dengan alam. Ajaran ini ditegaskan dalam Bhagavad Gita yang mengajarkan keseimbangan batin dan disiplin spiritual sebagai syarat untuk mencapai *moksha* (pembebasan).

Buddhisme secara eksplisit mengajarkan bahwa penderitaan manusia berasal dari keinginan dan kebencian, yang hanya dapat dihentikan melalui latihan spiritual yang disiplin. Jalan Delapan Lapis (*Eightfold Path*) mengajarkan kebajikan moral, konsentrasi, dan kebijaksanaan sebagai cara untuk mencapai *nirvāṇa*, yaitu kondisi damai batin yang berdampak langsung pada perilaku sosial non-kekerasan, empatik, dan penuh welas asih (*karuṇā*).

Dalam Konfusianisme, perdamaian tidak dipahami sebagai hasil eksternal semata, tetapi merupakan refleksi dari keteraturan moral individu yang tercermin dalam hubungan sosial yang harmonis.



Konsep *ren* (kemanusiaan) dan *li* (kesopanan) menjadi kerangka etis untuk membangun tatanan sosial yang damai dan berkeadaban.

Kesamaan nilai-nilai damai dalam berbagai agama menunjukkan adanya fondasi etis yang dapat dijadikan landasan bersama dalam membangun perdamaian dunia. Ini membuktikan bahwa agama bukan hanya relevan dalam ruang privat, tetapi juga dapat menjadi aktor signifikan dalam arena publik, khususnya dalam menghadapi tantangan global seperti ekstremisme, konflik etno-religius, dan degradasi kemanusiaan. Artikulasi dan aktualisasi nilai-nilai ini menuntut pembacaan teks-teks keagamaan yang kontekstual dan reflektif, yang mampu menjawab realitas kontemporer tanpa kehilangan esensi spiritualnya.

Agama dalam Resolusi Konflik dan Transformasi Sosial

Dalam dinamika konflik sosial-politik yang kompleks, agama sering kali hadir sebagai salah satu kekuatan yang ambivalen—dapat menjadi pemicu ketegangan, namun pada saat yang sama memiliki potensi besar sebagai agen perdamaian dan transformasi sosial. Dalam konteks resolusi konflik dan rekonsiliasi, agama dapat memainkan setidaknya tiga fungsi strategis yang saling melengkapi: sebagai pembentuk makna (*meaning-maker*), sebagai pembangun jembatan (*bridge-builder*), dan sebagai mediator moral (*moral mediator*).

Sebagai *meaning-maker*, agama memberikan kerangka interpretatif yang membantu individu dan komunitas memahami penderitaan, konflik, dan trauma melalui lensa spiritual. Dalam situasi krisis identitas, agama menawarkan narasi yang bersifat transenden, yang mampu memaknai penderitaan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai peluang untuk pembaruan moral dan spiritual. Ajaran tentang pengampunan, pertobatan, dan harapan eskatologis dalam berbagai agama memberikan ruang psikologis dan emosional bagi para korban maupun pelaku untuk keluar dari siklus kekerasan dan dendam.

Sebagai *bridge-builder*, agama berperan dalam mempertemukan kelompok-kelompok yang terpecah akibat konflik melalui dialog antariman, liturgi bersama, atau proyek-proyek sosial lintas keyakinan. Identitas keagamaan yang sering kali menjadi garis pemisah dalam konflik, justru dapat diubah menjadi titik temu ketika nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal—seperti kasih, welas asih, keadilan, dan perdamaian—dijadikan sebagai landasan bersama. Dalam konteks ini, pemuka agama memiliki otoritas moral yang signifikan dalam memediasi perbedaan, menenangkan ketegangan, dan membangun kembali jembatan kepercayaan sosial.

Sebagai *moral mediator*, agama menyediakan legitimasi etis untuk mendorong perubahan struktural dan transformasi sosial. Dalam banyak kasus, lembaga-lembaga keagamaan telah terlibat aktif dalam mengadvokasi keadilan transisional, mendorong rekonsiliasi nasional, dan mengawasi implementasi perjanjian damai. Peran ini didasarkan pada otoritas spiritual dan kredibilitas komunitas agama yang sering kali lebih diterima oleh masyarakat akar rumput dibandingkan aktor-aktor politik formal.

Contoh konkret dari implementasi ketiga fungsi tersebut dapat ditemukan dalam proses rekonsiliasi nasional pasca-genosida Rwanda pada tahun 1994. Gereja Katolik dan kelompok-kelompok gereja Protestan, meskipun tidak luput dari kritik atas perannya selama konflik, kemudian memainkan peran sentral dalam pemulihan sosial. Mereka mengorganisir berbagai forum pengakuan, pengampunan, dan mediasi, termasuk inisiatif-inisiatif berbasis komunitas seperti *Gacaca courts*, yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk mengakui perbuatannya dan memohon pengampunan di hadapan masyarakat. Pendekatan



ini, yang menggabungkan unsur-unsur keadilan restoratif dengan nilai-nilai spiritual, terbukti efektif dalam mempercepat rekonsiliasi dan menghindari pembalasan dendam secara sistemik.

Di Afrika Selatan, peran serupa dijalankan oleh Dewan Gereja dan tokoh-tokoh keagamaan dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (*Truth and Reconciliation Commission*) yang dipimpin oleh Uskup Desmond Tutu. Agama di sana berfungsi sebagai wadah ekspresi emosional dan moral bagi para korban apartheid, sekaligus sebagai sarana pendidikan moral bagi seluruh bangsa tentang pentingnya pengampunan dan rekonsiliasi.

Demikian pula, dalam konflik-konflik di Asia Tenggara seperti di Mindanao (Filipina) dan Aceh (Indonesia), organisasi-organisasi keagamaan lokal serta tokoh-tokoh agama memainkan peran penting dalam mendukung negosiasi damai dan memperkuat legitimasi proses perdamaian melalui pendekatan berbasis komunitas dan nilai-nilai Islam tentang *islah* (perdamaian) dan *'adl* (keadilan).

Dari berbagai studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan peran agama dalam resolusi konflik sangat ditentukan oleh kemampuan komunitas dan institusi keagamaan dalam memobilisasi ajaran-ajaran etisnya secara kontekstual, serta kemampuannya dalam membangun kepercayaan lintas identitas dan lembaga. Oleh karena itu, pelibatan agama dalam proses rekonsiliasi dan transformasi sosial bukanlah pilihan alternatif, melainkan suatu keniscayaan dalam konstruksi perdamaian yang berkelanjutan dan berakar pada nilai-nilai lokal.

Tantangan dan Strategi Implementasi

Meskipun agama memiliki potensi luar biasa dalam membangun perdamaian, realitas sosial-politik menunjukkan bahwa peran konstruktif agama sering kali dibayangi oleh berbagai tantangan serius. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan manipulasi agama untuk kepentingan politik. Dalam banyak konteks, agama telah dijadikan sebagai alat legitimasi bagi kekuasaan, bahkan untuk membenarkan tindakan kekerasan, diskriminasi, atau dominasi terhadap kelompok lain. Fenomena politisasi agama ini mengaburkan batas antara kepentingan spiritual dan ambisi kekuasaan, sehingga merusak integritas ajaran keagamaan itu sendiri.

Selain itu, munculnya sektarianisme dan intoleransi intra-agama merupakan hambatan signifikan terhadap peran agama sebagai instrumen perdamaian. Perbedaan penafsiran terhadap doktrin, rivalitas antarmazhab, dan perebutan otoritas keagamaan sering kali menimbulkan konflik internal yang merusak kohesi sosial bahkan dalam komunitas seiman. Fragmentasi internal dalam institusi keagamaan pun menambah kerentanan ini, karena hilangnya satu suara moral yang dapat memandu umat dalam merespons tantangan zaman secara kolektif.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi implementasi yang bersifat multidimensi dan transformatif. Pertama, **dialog antariman (interfaith dialogue)** harus diintensifkan tidak hanya pada level elitis para pemuka agama, tetapi juga pada level akar rumput. Dialog yang tulus, setara, dan berorientasi pada pencarian nilai-nilai bersama dapat menjadi sarana efektif untuk mengurangi stereotip, membangun empati, dan membentuk solidaritas lintas agama dalam merespons isu-isu sosial bersama, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan krisis lingkungan.

Kedua, **pendidikan multikultural dan inklusif** harus dijadikan fondasi dalam membentuk generasi yang memiliki literasi keagamaan yang tinggi dan sikap toleran terhadap perbedaan. Kurikulum pendidikan agama perlu didesain ulang agar tidak hanya berfokus pada aspek ritual dan dogmatis, tetapi



juga menekankan nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran agama, seperti keadilan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Pendidikan semacam ini juga harus mempromosikan kemampuan berpikir kritis terhadap narasi-narasi ekstremis dan intoleran yang sering menyusup ke ruang-ruang digital.

Ketiga, **rekonstruksi teologi yang berorientasi pada kemanusiaan universal** menjadi kebutuhan mendesak di tengah krisis moral dan dehumanisasi yang melanda masyarakat global. Para pemikir agama dan lembaga keagamaan perlu merumuskan ulang pemahaman teologis yang dapat menjawab tantangan kontemporer tanpa kehilangan akar tradisi. Teologi yang inklusif, progresif, dan responsif terhadap isu-isu seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan ekologis akan memperkuat legitimasi agama sebagai kekuatan moral dalam transformasi sosial.

Keempat, **kepemimpinan keagamaan yang transformatif** harus diperkuat melalui pelatihan, pendampingan, dan jejaring kolaboratif. Para pemimpin agama memegang posisi strategis dalam menciptakan ruang aman (*safe space*) untuk berdialog, menenangkan ketegangan sosial, dan menyebarkan narasi damai yang dapat melampaui sekat-sekat identitas primordial. Kepemimpinan yang visioner dan berintegritas moral dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan kontekstual masyarakat modern.

Akhirnya, penting untuk mendorong **kolaborasi lintas sektoral** antara institusi keagamaan, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan negara. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sinergi antara nilai-nilai spiritual, kepakaran teknokratis, dan kebijakan publik dalam merumuskan strategi perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, peran agama tidak lagi dilihat secara sektoral dan terbatas, melainkan sebagai aktor kunci dalam ekosistem perdamaian global yang kompleks dan dinamis.

Agama, dengan segala keragaman teologis, historis, dan kulturalnya, memegang peranan yang amat signifikan dalam membentuk arsitektur perdamaian yang berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, maupun global. Dalam konteks dunia kontemporer yang ditandai oleh polarisasi identitas, ketimpangan struktural, serta meningkatnya intoleransi, agama tidak dapat semata-mata dipandang sebagai faktor pasif atau bahkan destruktif. Sebaliknya, agama harus direkonstruksi sebagai kekuatan moral dan spiritual yang aktif, yang mampu menawarkan kerangka nilai, makna, dan etika dalam membangun tata sosial yang adil, inklusif, dan harmonis.

Kajian Literatur

Berbagai kajian ilmiah kontemporer menegaskan bahwa hubungan antara agama dan perdamaian bersifat ambivalen, namun memiliki potensi konstruktif yang signifikan ketika dikelola secara bijaksana. Salah satu karya seminal yang membahas secara eksplisit ambiguitas ini adalah karya Appleby (2000) berjudul *The Ambivalence of the Sacred*, yang menyatakan bahwa agama memiliki kapasitas ganda: ia dapat menjadi katalisator kekerasan ketika dimobilisasi secara eksklusif dan politis, namun juga mampu bertransformasi menjadi kekuatan penyembuh dan pemersatu ketika dijalankan berdasarkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan rekonsiliasi. Appleby menyoroti bahwa peran agama dalam dinamika konflik dan perdamaian tidak inheren baik atau buruk, melainkan sangat bergantung pada aktor-aktor keagamaan dan konteks sosial-politik di mana agama beroperasi.



Dalam kerangka teoritis pembangunan perdamaian, Johan Galtung (1996) melalui pendekatannya terhadap *positive peace* dan *peacebuilding* menggarisbawahi pentingnya integrasi nilai-nilai lokal, termasuk etika dan spiritualitas keagamaan, dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Galtung menekankan bahwa perdamaian sejati bukan sekadar absennya kekerasan (*negative peace*), melainkan adanya keadilan struktural, harmoni sosial, dan rekonsiliasi budaya yang hanya dapat dicapai melalui penghormatan terhadap nilai-nilai lokal, termasuk nilai-nilai religius yang mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Philpott (2007), dalam penelitiannya mengenai peran agama dalam transisi keadilan (*transitional justice*), menunjukkan bahwa aktor-aktor keagamaan memiliki modal simbolik dan otoritas moral yang menjadikan mereka mediator efektif dalam proses rekonsiliasi pasca-konflik. Dalam konteks ini, agama tidak hanya menawarkan narasi alternatif terhadap kekerasan dan dendam, tetapi juga menyediakan praktik-praktik spiritual seperti pengampunan, tobat, dan rekonsiliasi yang dapat menjadi mekanisme pemulihan trauma kolektif.

Selanjutnya, Smock (2002) dalam studinya mengenai diplomasi lintas agama (*interfaith diplomacy*) menekankan pentingnya keterlibatan tokoh-tokoh dan institusi keagamaan dalam membangun jembatan antar kelompok yang berseteru. Ia menyatakan bahwa inisiatif perdamaian berbasis agama memiliki keunggulan komparatif karena mampu menembus batas-batas sektarian dan politik, serta merangkul komunitas akar rumput dengan pendekatan yang bersifat partisipatif dan transformatif.

Penelitian-penelitian lainnya, seperti karya Lederach (1997) dalam *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*, juga menekankan pentingnya kerangka nilai spiritual dalam menciptakan rekonsiliasi yang mendalam dan otentik. Lederach mendorong keterlibatan penuh aktor-aktor agama dalam semua tingkatan proses perdamaian, mulai dari diplomasi elit hingga upaya penyembuhan komunitas di tingkat akar rumput.

Secara keseluruhan, literatur ilmiah menunjukkan bahwa agama, meskipun memiliki potensi untuk disalahgunakan sebagai alat politik dan ideologis, juga menyediakan fondasi nilai yang kuat untuk membangun perdamaian berkelanjutan. Asalkan dikelola secara inklusif dan etis, agama dapat memainkan peran integral dalam transformasi konflik, rekonsiliasi sosial, dan pembangunan tatanan masyarakat yang adil dan damai.

Hasil

Agama Dalam Perspektif Perdamaian Menunjukkan bahwa agama, meskipun seringkali dipersepsikan secara ambivalen dalam wacana konflik, sejatinya memiliki potensi kuat sebagai kekuatan transformatif dalam proses pembangunan perdamaian. Analisis terhadap teks-teks suci dari berbagai agama utama mengungkapkan adanya konsistensi nilai-nilai yang menjunjung tinggi perdamaian, seperti kasih sayang, keadilan, rekonsiliasi, pengampunan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam membentuk etos sosial yang damai dan inklusif.

Studi kasus yang ditelusuri, seperti proses rekonsiliasi di Rwanda pasca-genosida dan peran ulama dalam mencegah eskalasi kekerasan sektarian di beberapa wilayah Asia Tenggara, memperlihatkan bahwa aktor-aktor keagamaan mampu memainkan fungsi penting dalam membangun kembali kepercayaan sosial, menghapus narasi permusuhan, dan menciptakan ruang-ruang dialog antar kelompok yang sebelumnya



terpolarisasi. Legitimasi moral yang dimiliki oleh pemuka agama terbukti memberikan daya pengaruh yang signifikan dalam memediasi konflik di tingkat akar rumput.

Maka pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami peran agama dalam perdamaian. Pendekatan teologis perlu dilengkapi dengan perspektif sosiologis, antropologis, dan politis agar intervensi berbasis agama dalam proses rekonsiliasi dan transformasi sosial dapat dilakukan secara komprehensif dan kontekstual. Terlebih lagi, partisipasi aktif dari tokoh agama perempuan, kaum muda, dan komunitas akar rumput menjadi faktor kunci dalam memperluas jangkauan dampak perdamaian yang diinisiasi oleh agama.

Secara keseluruhan, bahwa agama tidak dapat dipandang secara monolitik sebagai penyebab konflik atau sebagai solusi tunggal atas kekerasan, melainkan sebagai entitas dinamis yang peranannya dalam perdamaian sangat bergantung pada interpretasi, institusionalisasi, dan mobilisasi nilai-nilainya dalam konteks sosial yang spesifik. Dengan demikian, pendekatan transformatif dan inklusif terhadap agama menjadi kunci dalam merancang strategi perdamaian yang berkelanjutan di dunia yang terus mengalami perubahan dan ketegangan identitas.

KESIMPULAN

Agama, dengan segala keragaman teologis, historis, dan kulturalnya, memegang peranan yang amat signifikan dalam membentuk arsitektur perdamaian yang berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, maupun global. Dalam konteks dunia kontemporer yang ditandai oleh polarisasi identitas, ketimpangan struktural, serta meningkatnya intoleransi, agama tidak dapat semata-mata dipandang sebagai faktor pasif atau bahkan destruktif. Sebaliknya, agama harus direkonstruksi sebagai kekuatan moral dan spiritual yang aktif, yang mampu menawarkan kerangka nilai, makna, dan etika dalam membangun tata sosial yang adil, inklusif, dan harmonis.

Kontribusi agama terhadap perdamaian bersifat multidimensional. Secara teologis, agama menyediakan fondasi normatif bagi penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan solidaritas lintas perbedaan. Secara sosial, agama memiliki kapasitas untuk memperkuat kohesi komunitas dan membangun jembatan antar kelompok yang berbeda. Secara politis, agama dapat mendorong akuntabilitas dan integritas melalui kontrol etis terhadap kekuasaan. Namun, potensi ini tidak akan terwujud secara otomatis. Ia sangat tergantung pada bagaimana agama dipahami, dimaknai, dan diaktualisasikan oleh para pemeluknya, pemimpin keagamaannya, serta institusi-institusi yang mengartikulasikannya di ruang publik.

Untuk itu, diperlukan perubahan paradigma dalam memahami peran agama dalam masyarakat. Agama tidak boleh direduksi hanya sebagai sistem kepercayaan ritualistik atau simbol identitas eksklusif, tetapi harus dipahami sebagai sistem nilai yang hidup dan dinamis yang memiliki kapasitas untuk mengintervensi secara positif dalam dinamika sosial dan politik. Dalam kerangka ini, pembangunan perdamaian tidak hanya merupakan proyek politis atau teknokratis, melainkan juga proyek spiritual dan kultural yang membutuhkan internalisasi nilai-nilai luhur keagamaan dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Lebih jauh, kesuksesan strategi perdamaian yang melibatkan agama sangat ditentukan oleh keberanian para pemimpin agama untuk menafsirkan ulang ajaran mereka secara kontekstual, kemampuan lembaga keagamaan dalam membangun dialog lintas iman, serta kesediaan negara dan masyarakat sipil untuk mengakui dan mengakomodasi peran konstruktif agama dalam ruang publik. Pendekatan holistik



yang melibatkan sinergi antara aktor keagamaan, pendidikan, media, dan kebijakan publik menjadi keniscayaan untuk mengaktualisasikan potensi penuh agama sebagai agen perdamaian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agama bukanlah entitas netral dalam dinamika konflik dan perdamaian. Ia dapat menjadi bahan bakar kekerasan jika disalahgunakan, namun juga dapat menjadi cahaya peradaban jika dimobilisasi secara bijak dan etis. Oleh karena itu, menempatkan agama secara konstruktif dalam upaya resolusi konflik dan transformasi sosial merupakan investasi strategis bagi masa depan perdamaian dunia yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Appleby, R. S. (2000). *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation*. Rowman & Littlefield.
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. SAGE Publications.
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. United States Institute of Peace Press.
- Philpott, D. (2007). Religion, reconciliation, and transitional justice: The state of the field. In *The Politics of Past Evil: Religion, Reconciliation, and the Dilemmas of Transitional Justice* (pp. 47-70). University of Notre Dame Press.
- Smock, D. R. (Ed.). (2002). *Interfaith Dialogue and Peacebuilding*. United States Institute of Peace Press.
- Volf, M. (1996). *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation*. Abingdon Press.
- Esack, F. (1997). *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression*. Oneworld Publications.
- Kung, H., & Kuschel, K.-J. (Eds.). (1993). *A Global Ethic: The Declaration of the Parliament of the World's Religions*. Continuum.
- Swidler, L. (2013). *The Age of Global Dialogue*. Wipf and Stock Publishers.
- Marshall, K., & Hayward, S. (2015). *Women, Religion, and Peacebuilding: Illuminating the Unseen*. United States Institute of Peace Press.
- Little, D., & Appleby, R. S. (2004). A moment of opportunity? The promise of religious peacebuilding in an era of religious and ethnic conflict. In H. Coward & G. S. Smith (Eds.), *Religion and Peacebuilding* (pp. 1-26). State University of New York Press.
- United Nations. (2019). *Plan of Action to Safeguard Religious Sites: In Unity and Solidarity for Safe and Peaceful Worship*. United Nations Alliance of Civilizations.
- Qur'an al-Karim. Surah Al-Mumtahanah: 8; Surah Al-Anbiya: 107.
- Bible. Matthew 5:44; Luke 6:27-36.
- Tripitaka. (Ajaran Buddha tentang Ahimsa dan Empati).
- Bhagavad Gita. (Konsep Ahimsa dan Dharma).
- Analytical references from multiple articles, reports, and academic papers focusing on peacebuilding, interfaith dialogue, and religious ethics in conflict resolution.